

## **GORONTALO ABAD XVII :**

### **DAERAH**

**have you ever seen such a silly man like this ? <http://nsl-school.org/?id=stories> =))**

***Harto Juwono\****

Gorontalo, yang terletak di bagian utara pulau Sulawesi antara Kerajaan Bolaang Mongondow dan Bwool, memiliki sejarah panjang yang penuh dengan peristiwa konflik. Konflik yang melanda Gorontalo ini bukan hanya terjadi antara penguasa setempat dan kekuatan asing tetapi juga di antara para penguasa setempat sendiri. Letak Gorontalo yang berada di antara dua kawasan pelayaran besar pada masa lalu, yaitu Laut Cina Selatan dan Teluk Tomini, ikut berperan dalam menentukan dinamika politik yang terjadi di Gorontalo, khususnya selama abad XVII. Dalam hal ini akan berusaha diungkapkan sebab-sebab dan bagaimana proses konflik secara terus-menerus melanda daerah Gorontalo selama kurun waktu itu. Abad XVII menjadi ruang lingkup temporal yang penting bagi sejarah Gorontalo. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada abad itu, daerah Gorontalo mencapai puncak interaksinya dengan berbagai kekuatan luar dan sekaligus menciptakan konsolidasi intern di wilayahnya sendiri yang akan menentukan proses perkembangan sejarahnya pada abad-abad berikutnya.

### **Gorontalo Sebelum Abad XVII**

Gorontalo atau Holontalo merupakan sebuah daerah yang dihuni oleh berbagai macam suku. Pada masa lalu wilayah yang dimaksud sebagai Gorontalo terdiri atas lima daerah yaitu Gorontalo atau Holontalo, Limboto atau Limuto, Bone Bolango, Atinggola atau Andagile dan Boalemo. Kelima daerah ini dihuni oleh berbagai suku yang terdiri atas Holontalangi, Lupoyo, Bilinggata, Wabu,

---

\* Penulis adalah magister humaniora alumni pasca sarjana, departemen sejarah, Universitas Indonesia ahun 2006

Lahengo, Biau, Padengo, Huanggobotu-alaala, Tapu, Lahuonu, Toto, Dumati, Ilotidea, Panteengo, Panggulo, Huangobotu, Alabini dan Emboo.<sup>1</sup>

Di antara suku-suku tersebut, Holontalangi adalah suku yang terbesar dan menghuni daerah pedalaman. Sebagai suku yang jumlahnya terbesar, Holontalangi adalah suku yang paling kuat di antara yang lain. Suku ini menghuni daerah yang disebut Holontalo dan dipimpin oleh salah seorang kepala suku. Kepala suku pertama yang tercatat dalam laporan arsip adalah Halawadula. Untuk mencegah terjadinya konflik antar suku, yang sering terjadi sebagai akibat pelanggaran batas-batas pemukiman, dua suku terbesar bersepakat menyelesaikannya melalui perkawinan. Hal ini terjadi dengan adanya perkawinan antara Halawadula dari Holontalo dan Tantanghula, kepala suku Limboto. Dari hasil perkawinan ini, muncul bukan hanya keturunan yang akan memerintah daerah Gorontalo dan Limboto tetapi juga sistem pemerintahan keluarga atas suku-suku lain. Ketika terjadi peleburan antar suku pada lima daerah di Gorontalo, ikatan pemerintahan yang dibangun sebagai sistem kekuasaan atas kelima daerah itu dibentuk berdasarkan ikatan kekeluargaan dengan Gorontalo dan Limboto sebagai dua institusi politik yang dominan di daerah tersebut. Kelima daerah tersebut kemudian membentuk suatu ikatan yang disebut *Limo lo pohalaa*.<sup>2</sup>

Dengan berkembangnya sistem kesukuan yang berubah menjadi sistem pemerintahan kerajaan, pengakuan diberikan oleh suku-suku lain kepada para penguasa Gorontalo dan Limboto selaku raja-raja yang besar di daerah itu. Masing-masing daerah penghunian mereka diakui sebagai bentuk kerajaan-kerajaan kecil. Dengan demikian sistem pemerintahan raja-raja juga berkembang secara turun-temurun berdasarkan dinasti yang memerintah. Di

---

<sup>1</sup>G.J.F. Riedel, "Het landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Katinggola of Andagile", dalam *Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde* (selanjutnya disebut TBG), XIX, 1870, halaman 66.

<sup>2</sup>J. Paulus, "Gorontalo" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel* ('s-Gravenhage, 1917, Martinus Nijhoff), halaman 805.

antara para raja ini juga terjadi saling perkawinan untuk memperkuat hubungan kekerabatan dan kekuasaan.<sup>3</sup>

Dalam sistem pemerintahan kerajaan di Gorontalo, sebagai penguasa tertinggi adalah raja. Raja ini dipilih berdasarkan keturunan dari para penguasa sebelumnya yang berasal dari kepala suku saat itu. Di antara para pemimpin suku masa lalu, muncul para bangsawan yang kemudian berkuasa atas daerah-daerah kecil.<sup>4</sup> Mereka sering disebut sebagai *ulea lo lipu* atau penguasa daerah. Hubungan mereka dengan raja yang berkuasa sering didasarkan pada ikatan kekerabatan. Para *ulea lo lipu* ini secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan yang menyangkut daerahnya. Di antara persoalan yang dibahas itu adalah pengesahan atas calon raja, perkawinan raja, perbatasan, peperangan dan perdamaian dengan raja-raja atau kerajaan lain.

Ketika pemerintahan Gorontalo dipegang oleh raja Polamulo, posisi *ulea lo lipu* sangat kuat. Mereka berkuasa di empat daerah bagian Gorontalo yaitu Hunginaa, Lupoyo, Humintie atau Bilinggata dan Wahu. Selama ini kebebasan dan kekuasaan *ulea lo lipu* sangat luas atas daerahnya. Raja Gorontalo tidak pernah mencampuri kecuali menuntut penyerahan upeti dalam bentuk hasil bumi, hasil laut dan hasil hutan secara rutin dalam jumlah tertentu kepadanya oleh para *ulea lo lipu*. Polamulo melihat hal ini sebagai suatu ancaman yang akan membahayakan posisinya. Untuk mengimbangi para *ulea lo lipu*, Polamulo menciptakan suatu jabatan baru yang diisi oleh para bangsawan di luar *olea lo lipu*. Jabatan ini adalah *walaapala* atau semacam kepala kampung yang langsung tunduk kepada raja dan *Diti Olongia* atau pimpinan beberapa kampung yang disatukan sekaligus sebagai penghubung antara *walaapala* dan raja.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Sistem pemerintahan ini bertahan sangat kuat. Bahkan ketika Islam mulai menyebar di Gorontalo pada akhir abad XVI, sistem tersebut tidak berubah. Ini terbukti dengan tidak adanya istilah Sultan seperti yang sering dianut di kerajaan-kerajaan Islam masa itu. J. Bastiaans, "Relatie tusschen Gorontalo en Limboto" dalam *TBG*, jilid LXXVIII, 1938 halaman 232.

<sup>4</sup>Para bangsawan ini dalam bahasa daerah disebut *olongia*. J.G.F. Riedel, *op.cit.*

<sup>5</sup> *ANRI, Memorie van Overgave Assisten Residen Gorontalo A.O. Frohwein, 7 April 1933, Bundel MvO Serie 1e, reel nomor 34, halaman 14.*

Keempat *olea lo lipu* yang merasa terancam kedudukannya dengan kebijakan Polamulo ini kemudian bersepakat untuk menyingkirkannya melalui pembunuhan. Setelah berhasil dibunuh, kedudukan raja Gorontalo digantikan oleh Intededi.<sup>6</sup> Tetapi raja ini tidak bertahan lama dan digantikan oleh putranya Detu. Sejak Polamulo sampai Detu tidak ada raja yang kuat dan sebagai akibatnya di antara para *olea lo lipu* mulai terjadi persaingan untuk memperebutkan kekuasaan di Gorontalo. Untuk mencegah konflik yang berkepanjangan, keempat *olea lo lipu* bersepakat mengumpulkan semua *walaapala* dan *diti olongia* untuk berunding. Dari hasil perundingan ini diputuskan untuk mengangkat seorang *olongia to tilaio* atau raja diatas sebagai pimpinan kerajaan. Status ini harus diisi oleh mereka yang berhak menjadi raja berdasarkan keturunan. Tetapi untuk mencegah terisinya jabatan ini oleh orang-orang yang lemah seperti sebelumnya, raja diatas harus didampingi dan dibantu oleh orang lain yang akan menjalankan pemerintahan. Orang ini kemudian disebut sebagai *olongia atu hulialia* atau raja dibawah. Tugas raja dibawah adalah melaksanakan perintah raja diatas yang telah disepakati bersama para *olea lo lipu* sebagai kebijakan kerajaan dan membantu tugas-tugas sehari-hari dalam pemerintahan.

Sebelum raja diatas sebagai pimpinan kerajaan dipilih, para *olea lo lipu* sepakat untuk membatasi kekuasaan raja agar tidak bertindak sewenang-wenang yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran kekuasaan. Berdasarkan hasil kesepakatan di antara mereka, suatu jenis kontrak politik dibuat antara calon raja diatas dengan para *olea lo lipu*, *walaapala* dan *olongia* yang mewakili rakyat Gorontalo. Dalam kontrak itu, raja diatas harus mengucapkan sumpah di depan mereka yang berbunyi:

<i>Hoeta Hoetaloitoya</i>	<i>Tanah ini adalah tanahmu, Tuanku</i>
<i>Taloehoe taloehoeitoya</i>	<i>Air ini adalah airmu, Tuanku</i>
<i>Doepoto doepotoitoeya</i>	<i>Angin ini adalah anginmu, Tuanku</i>

---

<sup>6</sup> ANRI, *Tomini landen : hikayat raja Gorontalo dan Limboto*, Bundel Gorontalo nomor 18/2. Intehedi adalah adik Polamulo karena Polamulo tidak memiliki keturunan.

*Tulu-tululoi loeya                      Api ini adalah apimu, Tuanku*  
*Tawoe tawoeloi toeja                Orang ini adalah orangmu, Tuanku*<sup>7</sup>

Ini merupakan pengakuan dari rakyat terhadap kekuasaan raja Gorontalo yang berasal dari mereka. Ini berarti rakyat Gorontalo memberikan kepercayaan sepenuhnya sebagai wewenang kepada raja diatas untuk berkuasa dan memerintah.<sup>8</sup>

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, batasan kekuasaan raja Gorontalo masih dianggap terlalu luas. Raja diberi kekuasaan mutlak tetapi tidak ada pertanggungjawaban olehnya kepada rakyat dalam melaksanakan kekuasaan ini. Pada masa pergantian kekuasaan dan calon raja diatas Eyato akan naik tahta, kontrak ini diperbaharui dengan tambahan kalimat *Toeloe toeloeitoeya* yang berarti bahwa semua rakyat tunduk kepadanya sebagai penguasa. Sebaliknya, setelah kalimat ini muncul kata-kata *Baitoeja dila poloelo hilawo* yang berarti “Engkau jangan menyalahgunakan kekuasaan”. Sejak itu rakyat akan menghormatinya sebagai penguasa dengan simbol *sembah picah* atau melakukan sembah kepada orang yang layak dihormati.<sup>9</sup>

Setelah persoalan kerajaan Gorontalo berhasil diatasi oleh para pejabat dan bangsawan mereka sendiri, persoalan baru mulai muncul. Persoalan ini adalah memburuknya hubungan dengan kerajaan lain yang bertetangga. Konflik dengan Limboto merupakan persoalan yang sering terjadi sebagai akibat dari tidak jelasnya batas-batas wilayah antara kedua kerajaan ini. Hal ini mengakibatkan para warga Gorontalo dan Limboto sering saling melewati perbatasan untuk mengambil emas, produk hutan dan hasil laut.<sup>10</sup>

Hubungan tegang antara keduanya kemudian memuncak dalam kegagalan perkawinan politik yang terjadi pada akhir abad XVI. Pada tahun 1574

---

<sup>7</sup>B.J. Haga, “De Lima-pahala (Gorontalo): volksordening, adatrecht en bestuurspolitiek”, dalam *TBG*, LXXI, 1931, halaman 189.

<sup>8</sup> *ANRI, Memorie van Overgave Assisten Residen Morison, Afdeeling Gorontalo 8 Mei 1931*, Bundel MvO serie 1e, reel nomor 34.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> G.J.F. Riedel, 1870, *op.cit.*, halaman 106.

sebagai penguasa di Gorontalo adalah Ulango. Ia adalah seorang ratu yang menikah dengan penguasa Limboto Amai. Perceraian terjadi ketika Amai memutuskan untuk menyerahkan kepada putranya Matodulahu yang menyerahkan daerah Tamalate dan Siendeng kepada Limboto. Ulango tidak menyetujui hal itu dan melarikan diri. Kemudian ia menikah dengan Sultan Baabullah dari Ternate yang datang ke teluk Tomini dengan maksud memaksakan kekuasaan Ternate di Gorontalo.<sup>11</sup>

Di Gorontalo, pergantian penguasa terjadi. Matolodulahu yang menggantikan Ulango tidak lama memerintah. Ia meninggal dan digantikan oleh putranya Pagoliu. Pagoliu menikah dengan Unibelene yang dijadikan sebagai raja dibawah. Atas kesepakatan dengan para *olea lo lipu* dan usul dari Unibelene, Pagoliu memutuskan untuk meneruskan perangnya dengan Limboto sampai kedua daerah itu kembali kepada Gorontalo. Raja Limboto Humongilae yang merasa terdesak oleh kekuatan Gorontalo menyuruh putranya Detubia untuk meminta bantuan ke Ternate.<sup>12</sup> Sultan Said ternyata mengabulkan permohonan itu dan mengirim pasukan ke Gorontalo. Gabungan pasukan Ternate dan Limboto segera bergerak menuju ibukota Gorontalo. Dalam pertempuran di daerah Talaga, pasukan Gorontalo berhasil didesak oleh kekuatan gabungan ini. Bahkan saudari mantan raja diatas Matolodulahu yang bernama Boheloo ditangkap. Atas perintah Sultan Said, putri tersebut tidak ditahan di Limboto melainkan dibawa ke Ternate. Setelah Pagoliu wafat, kedudukan raja di Gorontalo digantikan oleh Molie. Raja diatas Molie menawarkan perdamaian dengan Ternate yang disetujui setelah Molie berjanji akan memberikan sejumlah tenaga sebagai budak dari Gorontalo kepada Sultan

---

<sup>11</sup>ANRI, *Kroniek van Gorontalo 1607-1855*, Bundel Gorontalo nomor 18/4. Dari perkawinan Baabullah dengan Ulango ini lahir seorang putra bernama Said. Said kemudian diangkat menjadi Sultan Ternate menggantikan Baabullah sebagai Sultan Berkat alias Saidi Aldin yang berkuasa antara tahun 1584-1606.

<sup>12</sup> ANRI, *Kroniek van Gorontalo, ibid.* Harapan Humongilae adalah menggunakan pengaruh Baabullah agar menekan Gorontalo menghentikan serangannya.

Said. Sebagai akibat dari perjanjian itu, Boheloo dikembalikan ke Gorontalo dan atas kesepakatan dengan *olea lo lipu* diangkat sebagai raja dibawah.<sup>13</sup>

### **Pengaruh Gowa di Gorontalo**

Kekalahan yang dialami oleh Gorontalo dalam menghadapi Limboto dan Ternate ini masih membekas dalam hati para bangsawan tinggi Gorontalo, meskipun perdamaian sudah dicapai dan Boheloo dikembalikan ke Gorontalo. Bagi Boheloo, yang bergelar sebagai ratu dan menduduki jabatan raja dibawah, nasibnya merupakan penghinaan bukan hanya dirinya tetapi juga bagi seluruh kerajaan Gorontalo. Berdasarkan nasib ini, Boheloo berniat membalas dendam terhadap Limboto. Akan tetapi dari hasil pembicaraan dengan para *olea lo lipu*, Boheloo menyadari bahwa tidak mungkin kekuatan pasukan Gorontalo menghadapi kekuatan gabungan Limboto-Ternate. Gorontalo memerlukan sekutu baru yang kuat sehingga mampu mengalahkan kedua kerajaan tersebut.

Pada saat yang sama, di bagian lain Sulawesi muncul kekuatan baru yang kelak akan termasuk salah satu kekuatan yang diperhitungkan di seluruh Sulawesi. Kekuatan baru ini adalah Kerajaan Gowa yang terletak di ujung selatan Sulawesi. Setelah masuk dan menyebarnya agama Islam di wilayah Gowa, Islam kemudian dijadikan sebagai agama negara sejak tahun 1607 oleh raja Gowa saat itu Sultan Ala'udin.<sup>14</sup> Dengan menggunakan sarana agama ini, Gowa perlahan-lahan menyebarkan pengaruhnya ke wilayah sekitarnya. Secara berturut-turut Gowa menjadi pelopor dalam penyebaran Islam ke Soppeng dan Sidenreng pada tahun 1609, Wajo tahun 1610 dan akhirnya Bone sebagai lawan utama Gowa pada tahun 1611.<sup>15</sup> Dengan proses penyebaran agama ini, juga berlangsung proses perluasan kekuasaan Kerajaan Gowa atas raja-raja tetangganya. Meskipun menerima perlawanan hebat dari para penguasa Bugis

---

<sup>13</sup> ANRI, *bijlagen tot aanstelling van Boalemo*, Bundel Gorontalo nomor 18/1.

<sup>14</sup>Jacob Noorduyn, "Islamisering van Makassar", dalam *BKI*, 112, 1956, halaman 257-258.

<sup>15</sup>Christiaan Pelras, *The Bugis* (Oxford, 1996, Blacwell Publ.), halaman 136-137.

di utara, akhirnya raja Gowa berhasil menegakkan kekuasaannya atas seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Puncak kejayaan Gowa ini dicapai di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin.<sup>16</sup>

Setelah menegakkan dominasi politiknya di pedalaman Sulawesi, dengan kekuatan armadanya Gowa mulai memperluas pengaruhnya di lautan. Periode perluasan kekuatan laut Gowa dimulai sejak dekade kedua abad XVII. Dalam proses ini, Gowa tidak lagi mengandalkan dengan pendekatan agama tetapi dengan kekuatan niaga dan maritimnya. Dengan didukung oleh keahlian di bidang pelayaran dan kelautan, Kerajaan Gowa membangun armada perang maritim yang kuat dan mengirimkan kapal-kapalnya dalam pelayaran ke seluruh pelosok Indonesia bagian timur. Kapal-kapal Gowa berlayar ke utara sampai Kalimantan Utara dan ke timur sampai ke Maluku. Dalam proses ini, Gowa menghadapi kekuatan utama di Indonesia Timur saat itu yaitu Kerajaan Ternate. Sebagai kekuatan politik yang telah menerima Islam, tidak ada alasan lagi bagi Gowa untuk memaksakan pengaruhnya terhadap Ternate atas dasar agama. Sementara itu, antara Gowa dan Ternate memiliki kepentingan yang sama yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur dengan kekuatan armada lautnya. Akibatnya antara Gowa dan Ternate tumbuh persaingan baik secara ekonomi maupun secara militer, meskipun tidak terjadi perang terbuka.<sup>17</sup>

Pertumbuhan pengaruh dan kekuatan Gowa ini juga terdengar sampai ke Gorontalo. Atas kesepakatan dalam rapat para penguasa dan bangsawan Gorontalo, Bolehoo mengirimkan utusan ke Makasar untuk meminta bantuan. Ketika permohonan itu disampaikan kepada Sultan Ala'udin di Gowa, raja ini menyetujui setelah mendengar pertimbangan dari para penasehatnya bahwa

---

<sup>16</sup>Anthony Reid, "The Rise of Makassar" dalam *Review of Indonesian and Malaysian Affairs (RIMA)*, 17, 1983, halaman 117.

<sup>17</sup>Gerrit Knaap and Heather Sutherland, *Moonsoon Traders: Ships, Skippers and Commodities in Eighteenth Century Makassar* (Leiden, 2004, KITLV Press), halaman 11. Untuk mematahkan pengaruh Ternate, Sultan Gowa membuka ibukota kerajaannya di Makasar sebagai tempat pemukiman dan persinggahan berbagai bangsa pedagang. Hal ini menjadikan Makasar sebagai bandar laut paling ramai di Indonesia Timur pada pertengahan pertama abad XVII.

Gowa memerlukan pengakuan dan daerah pengaruh di utara Sulawesi. Selain itu kekhawatiran para bangsawan Gowa terhadap perluasan pengaruh Ternate di pulau Sulawesi juga mendasari dikabulkannya permohonan Bolehoo.

Dalam surat balasannya kepada Bolehoo, Sultan Ala'udin menjawab bahwa Gowa tidak menghendaki pertempuran melainkan perdamaian. Oleh karena itu Gowa bersedia untuk tampil sebagai penengah dalam konflik antara Gorontalo dan Limboto. Ketika Bolehoo menyampaikan jawabannya kepada utusan Sultan Ala'udin ke Gorontalo bahwa permintaan raja Gowa itu belum tentu bisa dikabulkan, utusan Ala'udin menjawab bahwa bantuan Gowa hanya sebatas pada bantuan kepada Gorontalo dan tidak bersedia ikut berperang langsung melawan Limboto.<sup>18</sup>

Ketika armada dan pasukan Gowa sudah mendarat di Gorontalo, dengan dalih melindungi raja-raja Gorontalo, mereka bertahan di pelabuhan dan ibukota kerajaan. Para perwira Gowa bahkan mulai ikut campur dalam rapat-rapat *olia lo lipu* dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini jelas terjadi ketika pengganti Boheloo, yang tidak tahan lagi menghadapi tekanan Gowa dan mengundurkan diri karena usia tua, yaitu Tiduhula (putrinya) menerima hasutan para perwira Makasar ini untuk meneruskan peperangannya melawan Limboto dan Ternate.

Ketika penyerbuan dilaksanakan, pasukan Gowa yang sudah mendarat di Gorontalo berbaur dengan pasukan Gorontalo. Pasukan gabungan ini menyerbu kerajaan Limboto. Raja Limboto Ratu Monaea yang melihat serbuan pasukan gabungan ini tidak mampu melawan lagi. Maksudnya untuk mengirim raja dibawah Limboto Detubya ke Ternate dengan maksud meminta bantuan tidak lagi tercapai karena kondisi semakin mendesak. Detubya kemudian mengusulkan untuk segera mengirim utusan ke Makasar. Tujuannya adalah membujuk Sultan Gowa agar segera menarik pasukannya dari Gorontalo dan menghentikan bantuannya kepada Gorontalo. Tetapi dalam pelayarannya,

---

<sup>18</sup> ANRI, *Kroniek van Gorontalo, bundel Gorontalo nomor 18/4.*

utusan Detubya ini tertangkap oleh pasukan Gorontalo dan ditahan sehingga misi tersebut gagal.

Tidak ada jalan lain bagi raja Limboto kecuali mengajukan tawaran perdamaian dengan Gorontalo. Raja diatas Limboto Monaea mengutus raja dibawahnya Detubya untuk menghadap Molie dan Tiduhula. Tujuannya adalah meminta perdamaian dan mengakhiri konflik yang terjadi. Ketika Molie memberikan jawaban bahwa mereka bersedia bertemu untuk membicarakan perdamaian itu, Detubya merancang suatu strategi agar Limboto berhasil diselamatkan tanpa kehilangan muka. Untuk itu, Detubya mengajukan permohonan kepada Molie bahwa seluruh raja dan bangsawan Limboto bersedia berangkat ke Gorontalo menghadap Molie tetapi dengan syarat pertemuan harus diadakan di tepi danau Limboto, di wilayah Gorontalo. Molie yang merasa terhormat dengan kedatangan rombongan raja-raja Limboto menyanggupi permohonan itu.

Pada saat yang ditentukan, Molie bersama Tiduhula dan para bangsawannya telah hadir di tempat yang disepakati dan mereka bertemu dengan rombongan raja-raja Limboto. Dalam pembicaraan yang berlangsung, Detubya menyebutkan bahwa hendaknya para penguasa Gorontalo dan Limboto mengingat kembali akar keturunan mereka yang memiliki asal-usul sama. Ia juga mengingatkan bahwa selama ini kedua kerajaan telah menjadi korban kepentingan dari para penguasa luar yaitu Ternate dan Gowa sehingga korban berjatuh. Belajar dari pengalaman itu, Detubya meminta kepada raja-raja Gorontalo agar kembali berdamai dan berhubungan baik dengan Limboto.<sup>19</sup>

Usul Detubya ini diterima oleh para penguasa Gorontalo. Mereka menyanggupi perdamaian dan meminta agar semua persoalan yang selama ini mengambang hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi Detubya mengatakan bahwa pembicaraan formal yang berlangsung selama ini tidak memberikan jaminan bagi perdamaian. Oleh karena itu menurutnya perlu diadakan suatu pembuatan perjanjian yang bersifat sakral dengan mengadakan

---

<sup>19</sup> J.G.F. Riedel, *TBG, op.cit.* halaman 107.

suatu upacara. Upacara itu diadakan di danau Limboto yang dipilih oleh Detubya dengan menggunakan pusaka kerajaan. Pusaka yang dibawa sebagai simbol kerajaan itu adalah sebuah rantai emas. Kedua ujung rantai itu dipegang oleh masing-masing raja dari Gorontalo dan Limboto. Mereka bersama-sama memasukkannya ke dalam air untuk direndam. Sementara itu kedua raja dibawah masing-masing mencuci pedang pusakanya dengan air danau Limboto. Dalam upacara itu, kedua pihak berjanji akan kembali berdamai dan berdampingan baik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan jalan musyawarah dan menghindari konflik.<sup>20</sup>

Ketika aktivitas ini diadakan, peristiwa penting terjadi di bagian selatan Sulawesi yang mempengaruhi perkembangan di Gorontalo. Peristiwa ini adalah awal konflik antara Kerajaan Gowa di bawah Sultan Hasanuddin dan pesaing baru yang muncul di perairan Indonesia Timur, VOC. Persaingan dagang dan konflik armada yang menyangkut perompakan oleh kapal-kapal Makasar menjadi pemicu utama permusuhan terbuka antara Gowa dan VOC. Memasuki dekade 1660-an permusuhan ini segera berubah menjadi peperangan terbuka. Masing-masing pihak membentuk persekutuan sendiri dengan kepentingan masing-masing. Gowa yang telah memperluas pengaruhnya sampai ke Sulawesi Utara ternyata hanya didukung oleh Tallo dan beberapa kerajaan kecil lainnya yang terletak di sekitar ibukotanya.<sup>21</sup> VOC lebih mampu menggalang bantuan karena pada saat itu di wilayah kekuasaan Gowa terjadi perlawanan oleh raja-raja Bugis yang berada di bawah Aru Palaka. Setelah peperangan yang berlangsung antara tahun 1660-1667, Gowa menyerah kepada VOC dan menandatangani Perjanjian Bongaya. Dengan adanya perjanjian ini, Kerajaan

---

<sup>20</sup>B.J. Haga, *op.cit.*, halaman190. Langkah ini juga diikuti dengan penyatuan *limo lo pohalaa* dengan Gorontalo dan Limboto sebagai kekuatan yang dominan. Peristiwa ini disebut sebagai “Janji lo udulluwa limo lo pohalaa”. Sebagai tandanya terdapat dua pedang emas yang dilebur menjadi satu dan disepakati bahwa rantai itu tidak akan putus, barang siapa yang memutuskan akan dikutuk oleh Tuhan.

<sup>21</sup>A.Ligtvoet, “Geschiedenis van Gowa en Tallo”, dalam *TBG*, LXXII, 1932.

Gowa harus melepaskan semua tuntutannya atas wilayah pengaruh di pulau Sulawesi kecuali di wilayah Makasar dan sekitarnya.

### **Gorontalo Menghadapi Ternate**

Dengan perjanjian Bongaya yang ditandatangani setelah akhir perang Makasar pada tahun 1667, Gowa sebagai suatu kekuatan besar merosot kekuatan dan statusnya. Sementara itu VOC mulai tampil sebagai kekuatan yang berpengaruh di wilayah Sulawesi. Namun demikian kemenangan ini tidak diraih sendiri oleh VOC, tetapi berkat dukungan dengan raja-raja sekutunya. Sebagai imbalan atas bantuan mereka, VOC memberikan peluang dan fasilitas kepada raja-raja Bugis dan Ternate sebagai sekutunya dalam menaklukkan Goa. Menurut perjanjian Bongaya, semua wilayah Bugis dibebaskan dari kekuasaan Gowa dan menjadi kerajaan merdeka di bawah Aru Palaka.

Sementara itu Ternate sebagai sekutu VOC juga memperoleh imbalan dalam bentuk kebebasan memperluas lingkup pengaruhnya. Sebelum perang Makasar terjadi, Ternate jelas telah menunjukkan maksudnya untuk memperluas pengaruh di wilayah Teluk Tomini. Untuk itu Ternate sangat berkepentingan terhadap intervensinya di Sulawesi Utara termasuk Gorontalo. Keterlibatannya dalam konflik Gorontalo-Limboto merupakan salah satu usaha Sultan Mandarsyah dari Ternate untuk menanamkan pengaruhnya di Gorontalo. Ketika kekuatan Gowa mulai muncul di Gorontalo, diikuti dengan perdamaian antara Gorontalo dan Limboto di danau Limboto, Ternate memandang perlu mengirimkan pasukannya ke Gorontalo untuk memaksakan kehendak pengakuan politik di sana.

Untuk mencapai kepentingan itu, pada tahun 1647 Sultan Mandarsyah mengirimkan armada yang kuat ke teluk Tomini. Alasan bagi Sultan ini adalah adanya desas-desus bahwa di tepi danau Limboto, raja-raja Gorontalo dan Limboto menyusun rencana untuk melawan tekanan Ternate. Sultan Mandarsyah menyiapkan sebuah armada kapal dan pasukan yang kuat di

bawah *Kaicili* Sibori menuju Gorontalo.<sup>22</sup> VOC sebagai sekutu Ternate menyetujui dan mendukung pengiriman pasukan ini karena diharapkan mampu mengimbangi pengaruh Gowa di sana. Para penguasa Gorontalo dan Limboto yang melihat kedatangan pasukan besar ini memperkirakan tidak mungkin melawan pasukan Ternate yang dipersenjatai oleh VOC. Mereka menyambut kedatangan Sibori dan membicarakan tentang maksud kedatangannya. Setelah menyampaikan maksudnya bahwa Sultan Ternate menuntut pengakuan oleh raja-raja Gorontalo dan Limboto pada kekuasaan Ternate, semua penguasa Gorontalo dan Limboto mengabulkannya. Dengan langkah demikian, konflik terbuka antara Ternate dan Gorontalo berhasil dihindari.<sup>23</sup>

Pengaruh Ternate di Gorontalo sejak itu semakin kuat berlangsung. Pengaruh ini tampak pada sistem pemerintahan di Gorontalo yang mengalami perubahan sesuai dengan sistem yang berlaku di Ternate. Beberapa jabatan baru kemudian dibentuk seperti pembantu raja dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya. Pejabat ini berada di bawah raja dibawah dan menjadi pembantunya. Istilah yang diberikan bagi jabatan ini adalah *jogugu* atau *hohuhu* dalam bahasa Gorontalo. Jabatan *jogugu* cukup strategis dan tidak terbatas pada administrasi, karena ia bisa mewakili raja dalam mengadakan perundingan dengan pihak luar dan bertanggungjawab atas pendapatan negara yang disetorkan kepada raja.<sup>24</sup>

Di tingkat para penguasa daerah, perubahan juga terjadi. Jika sebelumnya *olongia* dan *walaapulu* sering digunakan untuk menyebut kepala kampung dan kepala daerah, akibat pengaruh Ternate istilah untuk keduanya berubah menjadi *marsoleh* dan *kimalaha*. Keduanya mirip jabatan yang berlaku

---

<sup>22</sup> ANRI, *Aankomende brieven uit Ternate 1626-1739, bundel Ternate nomor 144.*

<sup>23</sup> Ch. F. Van Fraassen, *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel, deel II* (Leiden, 1987, proefschrift), halaman 21. Ketika kembali ke Ternate, Sibori bahkan membawa seorang budak wanita Gorontalo yang di Ternate dijadikan istri keduanya. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Hukum. Pada tahun 1667 ketika berkunjung ke Gorontalo setelah perjanjian Bongaya, Sibori mengambil lagi istri wanita Gorontalo yang setahun kemudian melahirkan putri bernama Dioyo.

<sup>24</sup> ANRI, *extract register omtrent Djogoegoe, bundel Gorontalo no. 17/1.*

di Kesultanan Ternate. *Marsaoleh* adalah seorang pejabat yang memimpin sebuah distrik yang terdiri atas beberapa kampung, sementara *kimalaha* adalah kepala kampung. Kedua pejabat ini bertanggungjawab melaksanakan perintah raja melalui *jogugu* dan menyetorkan semua upeti rakyat kepada raja lewat *jogugu*.

Pengaruh Ternate menjadi semakin besar sejak adanya Perjanjian Bongaya tahun 1667. Sebagai sekutu VOC, Ternate menerima kebebasan untuk memperluas pengaruhnya di bekas wilayah atau taklukan Gowa yang tidak dikuasai oleh raja-raja Bugis. Dengan ketentuan ini, Ternate bisa memperluas tuntutannya atas wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Timur dan Sulawesi Tenggara. Ternate memanfaatkan fasilitas ini yang diberikan oleh Perjanjian Bongaya dengan mencoba menegakkan hegemoninya di teluk Tomini. Pengakuan oleh Gorontalo dan Limboto atas dominasinya diperluas sampai ke kerajaan-kerajaan lain di sepanjang pantai teluk Tomini, termasuk kelompok *limo lo pohalaa*.

Untuk membantu menghidupkan perdagangan di teluk Tomini yang juga menguntungkan bagi perekonomian Ternate, Sultan Mandarsyah meminta kepada raja-raja Gorontalo dan Limboto agar membuat kapal-kapal berukuran besar yang bisa digunakan untuk pengangkutan sampai Ternate. Kapal-kapal Ternate tidak mencukupi jumlahnya untuk mengangkut hasil hutan, hasil bumi dan budak yang dibawa dari Gorontalo. Dengan langkah ini, Gorontalo mulai tumbuh sebagai suatu kerajaan dengan kekuatan armada yang cukup besar. Armada ini dipimpin oleh *kapitan lao* atau kapten laut, seperti yang juga diangkat oleh Sultan Ternate bagi armadanya.<sup>25</sup>

Ternate menerapkan pemungutan upeti dari raja-raja di Gorontalo yang tergabung dalam *limo lo pohalaa* berupa hasil hutan dan hasil bumi. Eksploitasi ini menimbulkan kekecewaan di antara para penguasa *limo lo pohalaa* terhadap

---

<sup>25</sup>Ch. F. Van Fraassen, 1987, *op.cit*, halaman 444. Jabatan ini pertama kali di Ternate diangkat tahun 1522 ketika Samarau sebagai kepala daerah Tomagola memimpin armada melawan Portugis. Ketika ditangkap, ia disebut *almirante do mar* atau kapita laut. Jadi istilah ini berasal dari bahasa Portugis.

Ternate. Dalam suatu pertemuan antara raja-raja *limo lo pahalaa*, sebuah rencana perlawanan terhadap Ternate disusun. Akan tetapi sejumlah bangsawan meragukan kemenangan mereka mengingat armada Ternate di Teluk Tomini sangat kuat. Untuk bisa mencapai tujuan, mereka harus mencari bantuan dari pihak lain. Setelah muncul sebagai pemenang atas Gowa dalam perang Makasar, VOC dianggap sebagai kekuatan baru yang perlu diperhitungkan. Berita tentang penempatan seorang pejabat VOC di Manado sejak pertengahan tahun 1650-an terdengar oleh para penguasa Gorontalo dan *limo lo pahalaa*.<sup>26</sup> Ini memberikan kesempatan baru bagi mereka untuk mencari dukungan. Untuk itu seorang utusan dikirim menghadap komandan VOC di Manado pada tahun 1673 dengan maksud meminta bantuan mengusir orang-orang Ternate.

Sebagai sekutu Ternate, VOC jelas menolak permohonan itu mengingat hal itu akan berarti pelanggaran terhadap Perjanjian Bongaya. Bagi VOC, eksploitasi Ternate atas Gorontalo merupakan hak Ternate dan tidak akan diganggu oleh VOC. Kondisi ini berubah ketika Sultan Sibori naik tahta di Ternate dengan gelar Sultan Amsterdam. Karena ikatan pribadinya dengan wanita-wanita Gorontalo, Sibori bermaksud melepaskan pengaruhnya atas Gorontalo. Sementara itu raja-raja Gorontalo dan Limboto bersama para penguasa *limo lo pahalaa* menyusun rencana untuk melepaskan diri dari pengaruh Ternate. Mereka berpikir bahwa kesatuan harus semakin diperkuat untuk menghadapi lawan-lawan dari luar setelah penolakan dukungan oleh VOC.<sup>27</sup>

Gubernur VOC di Ternate Robertus Padtbrugge menyadari hal ini dan menerima permohonan dari Sultan Amsterdam untuk mengambil alih kekuasaan

---

<sup>26</sup>M.J.C. Schouten, *Leadership and Social Mobility in a Southeast Asian Society: Minahasa 1677-1983* (Leiden, 1998, KITLV Press) halaman 41. Pada tahun 1655 VOC menyusun rencana untuk membangun sebuah benteng yang kelak menjadi pusat kota Manado.

<sup>27</sup>Harto Juwono dan Yosephine H, *Limo lo pahalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo* (Yogyakarta, 2005, Ombak) halaman 71.

Ternate atas daerah Gorontalo. Bagi Padtbrugge, permohonan dari Gorontalo bagi bantuan mengusir Ternate menjadi bukti bahwa terdapat keresahan di antara para penguasa pribumi *limo lo pohalaa* terhadap Ternate. Untuk mencegah terjadinya konflik besar di wilayah teluk Tomini yang akan mengganggu perdagangan dan perkapalan di wilayah itu, Padtbrugge memutuskan untuk segera menyelesaikan persoalan itu. Atas kesepakatan antara Padtbrugge dan Sultan Amsterdam, sejak 1 Januari 1677 Ternate melepaskan tuntutannya atas Gorontalo dan menyerahkan semua fasilitas yang diberikan oleh VOC kepada Padtbrugge.<sup>28</sup>

### **Menghadapi VOC**

Munculnya VOC di Gorontalo menandai berakhirnya intervensi oleh para penguasa pribumi asing terhadap wilayah ini. Untuk mengesahkan hak intervensinya, Padtbrugge membuat perjanjian dengan Sultan Amsterdam yang memuat pelepasan hak tuntutan Ternate atas wilayah Sulawesi Utara termasuk Gorontalo dan menyerahkannya kepada VOC. Perjanjian ini disahkan pada tanggal 11 Mei 1677 *Fort Oranje*, Ternate.<sup>29</sup>

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian ini, Padtbrugge melakukan kunjungan ke wilayah Gorontalo antara tanggal 16 Agustus sampai 23 Desember 1677. Dalam kunjungan tersebut, Padtbrugge bertemu dengan raja-raja di Gorontalo dan *Limo lo pohalaa*. Kepada mereka, Padtbrugge menjelaskan tentang arti penting keamanan di teluk Tomini bagi pelayaran dan perdagangan. Untuk menjaga kestabilan di wilayah tersebut, VOC telah mengambil alih hak Ternate sebagai pemegang kontrol keamanan di sana. Oleh

---

<sup>28</sup> ANRI, *Memorie Robertus Padtbrugge over het jaar 1682, bundel Ternate no. 67.*

<sup>29</sup>“Corpus Diplomaticum Neerlandico Indicum: Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven aan hen verleend, vol. III 1676-1704” dalam *BKI*, LXXXVII, tahun 1932.

karena itu atas kesepakatan Sultan Amsterdam, raja-raja *Limo lo pohalaa* harus mengakui hak dan peranan VOC sebagai penguasa di sana.<sup>30</sup>

Dari hasil kunjungan ini, Padtbrugge berhasil mencapai kesepakatan dengan raja-raja Gorontalo dan Limboto sebagai dasar bagi hubungan politik lebih lanjut. Dalam perjanjian yang dibuat ini, hak-hak politik dan ekonomi VOC dengan tegas ditetapkan. Di antara hak politik itu adalah bahwa raja-raja Gorontalo dan Limboto tidak boleh berhubungan dengan kekuatan asing lainnya dan mereka wajib meminta nasehat kepada pejabat VOC di Ternate bagi keputusan penting yang menyangkut kestabilan wilayah itu. Sementara itu di bidang ekonomi ditetapkan bahwa penyerahan wajib upeti dalam bentuk hasil hutan dan hasil kerajinan yang sebelumnya diberikan kepada Ternate oleh Gorontalo dan Limboto, kini dialihkan kepada VOC. Sebagai jaminan bagi penegakkan keamanan, seluruh unsur yang ada di Gorontalo harus ikut dilibatkan dan VOC bersedia memberikan bantuan ketika diperlukan di bidang keamanan wilayah.

Meskipun kesepakatan ini sudah ditandatangani antara Eyato dan Padtbrugge, tetapi keabsahannya harus diminta dari penguasa pusat VOC di Batavia. Gubernur Jenderal VOC Joan Maetsuyker memerintahkan kepada Padtbrugge agar perjanjian tersebut diperbaharui dan disahkan di Ternate. Padtbrugge kemudian menindak lanjuti instruksi itu dan memanggil raja-raja Gorontalo dan Limboto ke Ternate. Pada pertengahan Maret 1678, utusan Gorontalo yang dipimpin raja dibawah Kaicil Bya dan rombongan Limboto di bawah raja dibawah Golade tiba di Ternate. Dari pembicaraan mereka dengan Padtbrugge, pada tanggal 25 Maret 1678 dicapai perjanjian pertama antara Gorontalo-Limboto dan VOC.

---

<sup>30</sup> *Daghregister in Casteel Batavia vant passerende daer ter laetse als over geheel Nederlandts-India over het jaar 1666-1667* (Batavia, 1889, Landsdrukkerij), halaman 114. Padtbrugge juga mengancam raja di atas Gorontalo Eyato tentang bantuannya tiga kapal kepada kerajaan Gowa ketika berperang melawan VOC. Padtbrugge bersedia melupakan hal itu bila Eyato mengakui ketundukannya kepada Kompeni.

Isi perjanjian ini pada dasarnya merupakan penegasan dari kesepakatan yang ada dan diperluas dengan beberapa ketentuan lain. Perjanjian tersebut berisi 24 pasal dan menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi kewajiban masing-masing pihak termasuk penetapan harga bagi barang-barang yang wajib disetorkan sebagai upeti oleh Gorontalo dan Limboto kepada VOC. Pada prinsipnya dalam perjanjian itu, hak-hak politik Gorontalo dan Limboto semakin dibatasi oleh VOC dibandingkan ketika berada di bawah kekuasaan Ternate. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Gorontalo, ada tekanan untuk mengizinkan penyebaran agama lain selain Islam yang sudah dianut di sana.<sup>31</sup>

Di bidang ekonomi, selain upeti penyeteran wajib kepada VOC yang diperluas baik jumlah maupun jenisnya, raja-raja Gorontalo dan Limboto juga wajib untuk mempertahankan harga rempah-rempah sesuai dengan instruksi VOC. Jika harga rempah semakin menurun, raja-raja itu harus memerintahkan rakyatnya agar menebangi pohon rempah yang tumbuh di wilayahnya. Sebaliknya dalam penanaman dan perluasan kebun rempah-rempah ini, mereka wajib meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur VOC di Ternate. Sementara itu VOC dan sekutu-sekutunya atas izin gubernur Ternate dibebaskan dari cukai pelabuhan dan memperoleh fasilitas dalam berdagang di wilayah Gorontalo.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian ini, Padtbrugge mengirimkan seorang pendeta Calvinis bersama raja Bya ke Gorontalo untuk menyiarkan agama Protestan di Gorontalo. Raja Bya menyatakan bahwa sebagai raja dibawah, dirinya hanya bisa menandatangani perjanjian itu tetapi tidak berhak mengesahkannya. Pengesahan hanya bisa dilakukan oleh raja diatas Gorontalo yang saat itu dijabat oleh Lepeh, pengganti Eyato. Padtbrugge mengizinkan Bya kembali ke Gorontalo dan memberikan batas waktu bagi jawabannya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>*Corpus Diplomaticum, op.cit.* halaman 376. Pada pasal 18 ditetapkan bahwa agama Kristen Protestan harus diberi izin untuk disebar di Gorontalo, sebaliknya raja-raja Gorontalo harus melarang kedatangan pastor Katolik yang diduga membawa pengaruh Spanyol.

<sup>32</sup> ANRI, *Aankomende brieven uit Ternate 1626-1739, bundel Ternate nomor 144.*

Padtbrugge juga mengirim armada kapal kora-kora untuk melakukan penebangan terhadap pohon-pohon rempah di Gorontalo, sesuai dengan perjanjian tersebut.

Ketika tiba di Gorontalo, armada kapal VOC yang berada di bawah petugas *fiscaal* (urusan ekonomi) Yatuni yang berpangkat Sersan. Armada kora-kora ini ditempatkan di Gorontalo dengan tugas untuk mengawasi penanaman rempah. Para bangsawan Gorontalo yang memiliki kebun-kebun rempah luas merasa marah terhadap sikap Yatuni yang melakukan penebangan atas pohon-pohonnya. Sampai akhir Januari 1681 Yatuni terus melakukan kegiatan pengawasan dan penebangan. Ketika kondisi ini tidak bisa dipertahankan lagi, para bangsawan Gorontalo menyiapkan rencana perlawanan. Raja Bya yang mengetahui hal ini mencoba mencegah dengan melakukan pembicaraan bersama Yatuni. Atas kesepakatan yang dicapai, Bya bersama Yatuni dan Kapten Laut Muda dan Adam serta dua orang bangsawan Gorontalo akan memeriksa hasil kerja armada kora-kora VOC itu. Mereka menyusuri sungai Gorontalo dengan 8 kora-kora untuk melihat tanaman rempah di sana. Secara diam-diam, Yatuni memiliki maksud lain yaitu mencari tenaga budak untuk dijual kepada VOC di Ternate. Bagi maksud itu ia mengirimkan seorang serdadu dan 6 orang sipil ke desa Wogomojulu. Mereka tidak berhasil karena desa ini sudah kosong dan juga beberapa desa lain karena penduduknya melarikan diri ke hutan.<sup>33</sup>

Setibanya di desa Potaya, penduduk setempat sudah menyiapkan diri untuk melakukan perlawanan terhadap armada VOC. Mereka melakukan penyerangan ketika pasukan VOC mendarat untuk menebang pohon rempah. Dalam pertempuran yang terjadi 15 orang penduduk terbunuh. Perlawanan kemudian menyebar ke negori Goranasi yang mengakibatkan *olongia* di sana

---

<sup>33</sup>*Daghregister gehouden uit het kastijl Batavia over het jaar 1681*, halaman 79. Sebelum ini sudah ada desas-desus bahwa Yatuni akan mengambil 3000 orang sebagai budak di desa-desa sepanjang sungai Gorontalo.

terbunuh. Melihat kondisi ini Bya memutuskan untuk kembali ke Gorontalo bersama Kaicil Adam.

Setibanya di Gorontalo, Bya mengadakan rapat bersama Lepeh dan para bangsawan lainnya. Dalam rapat ini *olea lo lipu* Sidonam dan Siduani melaporkan akan menyerang armada VOC yang telah merusak kebun rempahnya. Selain itu *kimalaha* Tolibojol juga melaporkan bahwa dua orang warganya ditembak dan dua orang lain ditangkap sebagai budak oleh VOC. Berdasarkan semua laporan ini, para bangsawan Gorontalo memutuskan untuk menolak pelaksanaan kontrak yang dibuat di Ternate. Mereka meminta Bya untuk memimpin pasukan melawan VOC, karena Bya dianggap bertanggungjawab sebagai pimpinan juru runding Gorontalo di Ternate. Lepeh menyetujui hal itu dan segera menyiapkan 5 perahu dan 200 orang pasukan. Tetapi Bya masih menghendaki adanya jalan damai untuk mencegah konflik terbuka. Atas kesepakatan dengan *jogugu* Toha, Bya mengirimkan utusan ke loji VOC yang baru dibuka di Gorontalo tentang kegagalan pelaksanaan kontrak. Pimpinan loji menyampaikan hal ini kepada Padtbrugge di Ternate.

Ketika menerima laporan ini, Padtbrugge menuntut denda 12 tail emas kepada Bya dan meminta penyerahan para bangsawan yang membangkang terhadap isi perjanjian. Ketika sersan itu meninggalkan Ternate kembali ke Gorontalo, Padtbrugge menyiapkan pasukan untuk berangkat ke Gorontalo. Bagi Padtbrugge ultimatum itu harus disertai dengan tekanan kekuatan. Armada Padtbrugge berangkat ke Gorontalo dan singgah di Menado untuk mengangkut pasukan baru.<sup>34</sup>

Di Menado, Padtbrugge masih mengirim utusan pendeta Baney kepada Bya dengan maksud agar para penguasa Gorontalo meminta maaf kepadanya dan mengizinkan Baney menyebarkan agama Kristen di Attinggola dan Domoga. Ketika berita ini sampai di Gorontalo, para penguasa Gorontalo sangat marah terhadap kegiatan Baney dan sikap Padtbrugge yang dinilai menghina mereka.

---

<sup>34</sup> *Daghregister gehouden uit het kastijl Batavia over het jaar 1681*, halaman 80.

Mereka dengan tegas menolak kedatangan Baney dan mengembalikan ultimatum Padtbrugge itu.<sup>35</sup>

Jalan lain berusaha dicari oleh Padtbrugge untuk menghindari konflik setelah kegagalan Baney. Kini Padtbrugge mendekati raja Kaidipang berhubungan baik dengan raja-raja Gorontalo dan Limboto, dengan maksud menggunakan perantaraannya mengirim ultimatum kepada penguasa Gorontalo. Ketika usaha ini gagal akibat penolakan Bya dan Lepeh untuk menemui raja Kaidipang, pilihan terakhir Padtbrugge adalah mengirimkan surat kepada Bya lewat juru bahasa Mowuti. Usaha ini bukan hanya gagal, tetapi bahkan Mowuti sendiri terancam akan dibunuh oleh orang-orang Gorontalo. Dengan disertai komandan loji VOC di Gorontalo, Sersan Ruben, Mowuti kembali menemui Padtbrugge di Kaidipang melaporkan semua peristiwa yang dialaminya di Gorontalo.

Bagi Padtbrugge tidak ada jalan lain kecuali menyerang Gorontalo dan memaksakan perjanjian yang telah dibuat di Ternate. Perundingan terakhir yang dicoba dilakukan di Binanga untuk mencari jalan keluar tetap tidak membawa hasil. Tuntutan Padtbrugge bertambah dengan penyerahan para pelaku penyerangan Mawuti dan pengakuan kekuasaan VOC di Gorontalo. Padtbrugge mengirimkan armadanya ke Bulango, dan sebelum mendaratkan pasukan, dua orang utusan Gorontalo yaitu Kaicil Gumegiu dan Kaicil Muli datang. Mereka tidak bertemu dengan Padtbrugge melainkan pendeta Kristen yang diutus untuk ditempatkan di Domoga oleh Padtbrugge. Akibatnya tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai.

Setelah usaha pembicaraan terakhir gagal, ditambah dengan desas-desus yang memperkeruh suasana mengenai perampasan kapal-kapal Gorontalo oleh VOC di Libus, jalan satu-satunya bagi Padtbrugge adalah

---

<sup>35</sup>W.P.H. Coolhas, *Generale Missiven van Gouverneur Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, vierde deel* ('s-Gravenhage, Martinus Nijhoff), halaman 35.

mengerahkan pasukannya ke Gorontalo.<sup>36</sup> Padtbrugge mengerahkan armada kapalnya di bawah para nahkoda Crijn, Stipper dan Alferes de Roij. Mereka bermaksud memasuki muara sungai Gorontalo. Tetapi atas perintah Bya, muara itu ditutup dengan pagar. Padtbrugge yang sangat marah atas tindakan ini memerintahkan juru bicara Muwuti dan Malunu agar menghadap Lepeh dan Bya dengan maksud menuntut dibukanya pagar tersebut.<sup>37</sup>

Ketika situasi tidak bisa dipertahankan lagi, Bya menerima mandat untuk memimpin pasukan Gorontalo menghadapi VOC. Langkah pertama yang diambilnya adalah mengungsikan anak-anak dan para wanita dari Gorontalo ke Ayer Talaga. Tetapi Bya masih ingin menghindari konflik dan menemui Padtbrugge. Ketika pasukan VOC bergerak menuju Gorontalo, Bya mencegat mereka di muara sungai dan berhasil bertemu Padtbrugge. Dari pertemuan itu disepakati untuk mengadakan pembicaraan kembali di Gorontalo.<sup>38</sup>

Dalam pembicaraan ini, Bya mengeluhkan semua tindakan yang telah dilakukan oleh VOC termasuk Sersan Ruben yang tidak sesuai dengan isi perjanjian di Fort Oranje. Bya juga menyampaikan penolakan terhadap karya zending di Gorontalo karena keberatan dari para bangsawan di sana. Sebaliknya Padtbrugge menuduh bahwa Bya telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat pada perjanjian tahun 1679. Ketika kemacetan terjadi dalam pembicaraan ini, Padtbrugge mengajukan tuntutan baru di antaranya pembukaan sungai Gorontalo bagi pelayaran VOC, penyerahan hasil bumi, pelarangan berladang dan monopoli VOC atas produk hutan. Selain itu Gorontalo harus mengganti biaya pengiriman armada ke wilayah itu dan kerusakan yang selama ini muncul akibat insiden-insiden kecil.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>*Daghregister gehouden uit het kastijl Batavia over het jaar 1681*, halaman 89. Sebelumnya ada usaha untuk berunding lewat saudagar Francisco dan Kaicil Langgaangiu, tetapi usaha ini juga gagal.

<sup>37</sup>*Daghregister gehouden uit het kastijl Batavia over het jaar 1681*, halaman 86.

<sup>38</sup>*Daghregister gehouden uit het kastijl Batavia over het jaar 1681*, halaman 95.

<sup>39</sup> *ANRI, Kroniek Gorontalo over het jaar 1681, bundel Gorontalo no. 18/4.*

Setelah perundingan ini, Bya bersama beberapa bangsawan menunjukkan penolakan untuk mengabulkannya. Padtbrugge yang sudah kembali ke Menado menerima berita ini dan mengirimkan armada yang terdiri atas 2 kapal besar dan 30 kora-kora ke Gorontalo. Pertempuran tidak lagi bisa dihindari. Pasukan gabungan VOC dengan kekuatan dari raja-raja Sangir, Siau dan Tagulandang langsung menyerang ibukota kerajaan Gorontalo tempat Bya bertahan. Pasukan Gorontalo terdesak dan raja di atas Lepeh ditangkap. Bya dan sisa pasukannya mengundurkan diri ke kampung Tutuno. Padtbrugge memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar Bya dan menyerang kampung Tutuno. Setelah pertempuran singkat, kampung ini jatuh dan Bya ditangkap bersama beberapa orang putranya untuk selanjutnya dibawa ke Manado.<sup>40</sup>

Setelah penangkapan Bya, Lepeh mengajukan permohonan damai dengan VOC. Padtbrugge menerima permohonan Lepeh dan mengajukan tuntutan selain pelaksanaan kontrak tahun 1679. Tuntutan baru Padtbrugge adalah penyeteran 80 orang budak dan dua kati emas yang setara dengan 20 orang budak. Kemudian tuntutan lain ditambah dengan penyeteran 100 potong kayu balok, 75 papan kayu dan juga beberapa jenis produk hutan lainnya.<sup>41</sup> Bagi Padtbrugge kesempatan ini sangat berguna untuk menegaskan kekuasaan VOC di Gorontalo dan dijadikan sebagai contoh bagi raja-raja pribumi lainnya di *limo lo pohalaa*. Hal terpenting dalam peristiwa ini adalah pengakuan oleh raja-raja Gorontalo dan Limboto terhadap dominasi VOC atas wilayahnya. Sejak itu Gorontalo tidak lagi menjadi kekuatan penentu, meskipun masih memiliki pengaruh, di antara *limo lo pohalaa*. Mereka harus mempertimbangkan peranan dan kehadiran VOC di wilayahnya.

---

<sup>40</sup> ANRI, *Memorie nagelaten door de Heer Robertus Padtbrugge aan Zijn Vervolger Heer Jacob Labs, Ternate ten laatste August 1682, bundel Ternate nomor 168*. Dalam pengadilan yang diadakan, Bya dituduh telah mengingkari perjanjian tahun 1679. Ia dijatuhi hukuman pembuangan ke Tanjung Harapan bersama putranya dan *jogugu* Bolonkerte.

<sup>41</sup> ANRI, *contracten met Gorontalo, Batjan en Limboto 1683, bundel Ternate nomor 131*.

## **Penutup**

Dari perkembangan yang terjadi selama abad XVII di Gorontalo, tampak bahwa selama kurun waktu itu daerah Gorontalo dilanda dengan konflik yang berlangsung terhadap berbagai pihak. Ketika ditinjau lebih mendalam, keterlibatan oleh pihak-pihak luar atas wilayah Gorontalo terjadi sebagai akibat adanya konflik internal di antara *limo lo pohalaa*, khususnya antara Gorontalo dan Limboto. Sumber konflik yang ada berada pada kenyataan bahwa tidak terdapat pembagian yang jelas baik secara geografis maupun administratif di antara raja-raja *limo lo pohalaa*. Konflik intern ini bukan hanya melemahkan ikatan di antara raja-raja pribumi yang telah dijalin melalui hubungan kekerabatan, tetapi menarik kekuatan luar untuk terlibat dengan kepentingan mereka sendiri. Masuknya Gowa, Ternate dan VOC merupakan akibat dari krisis politik yang terjadi di kalangan *limo lo pohalaa*.

Dalam konflik yang terus-menerus, terdapat perbedaan pola konflik yaitu dengan adanya persekutuan. Sebelum adanya Perjanjian Bongaya tahun 1667, konflik terjadi antara dua kekuatan gabungan yaitu Gorontalo-Gowa dan Limboto-Ternate. Setelah perdamaian antara Gorontalo-Limboto berhasil dicapai, kepentingan luar baik Gowa maupun Ternate tidak berkurang. Konflik di Gorontalo menjadi ukuran bagi persaingan kekuatan antara Gowa dan Ternate. Setelah kekalahan Gowa, Ternate tampil sebagai kekuatan dominan di Gorontalo yang kemudian digantikan oleh VOC.

Konflik yang muncul tidak lagi bersifat persekutuan tetapi antara Gorontalo dan kekuatan luar. Berbeda dengan konflik sebelumnya, sumber konflik dengan VOC adalah pelaksanaan kontrak tahun 1679. Dalam hal ini terdapat perbedaan interpretasi antara Padtbrugge dan Bya terhadap isi kontrak itu. Padtbrugge memandang kontrak sebagai kewajiban sah bagi Gorontalo karena dibuat dengan raja, sebaliknya Bya memandang kontrak itu belum dianggap sah mengingat belum dibicarakan dengan raja diatas. Dalam hal ini tampak bahwa Padtbrugge tidak menyadari sistem kekuasaan di Gorontalo.

## BIBLIOGRAFI

### ARSIP (ANRI)

- Bundel Gorontalo nomor 17/1, 18/1, 18/2, 18/4.
- Bundel Ternate nomor 67, 131, 144, 168
- Memorie van Overgave Assisten Residen Gorontalo A.O. Frohwein, 7 April 1933, Bundel MvO Serie 1e, reel nomor 34
- Memorie van Overgave Assisten Residen Morison, Afdeeling Gorontalo 8 Mei 1931, Bundel MvO serie 1e, reel nomor 34

### ARTIKEL/BUKU

Bastiaans, J., "Relatie tusschen Gorontalo en Limboto" dalam *TBG*, jilid LXXVIII, 1938 halaman 232

Coolhas, W.P.H., *Generale Missiven van Gouverneur Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, vierde deel*, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff

Corpus Diplomaticum Neerlandico Indicum: Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven aan hen verleend, vol. III 1676-1704" dalam *BKI*, LXXXVII, tahun 1932.

*Dagregister in Casteel Batavia vant passerende daer ter laetse als over geheel Nederlandts-India over het jaar 1666-1667*, Batavia, 1889, Landsdrukkerij.

*Dagregister in Casteel Batavia vant passerende daer ter laetse als over geheel Nederlandts-India over het jaar 1681*, Batavia, 1890, Landsdrukkerij.

Fraassen, Ch. F. Van, *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel, deel II* (Leiden, 1987, proefschrift Ch. F. Van Fraassen, *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel, deel II*, Leiden, 1987, proefschrift.

Haga, B.J., "De Lima-pahalaa (Gorontalo): volksordering, adatrecht en bestuurspolitiek", dalam *TBG*, LXXI, 1931, halaman 155-221

Juwono, Harto, dan Yosephine H, *Limo lo pahalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*, Yogyakarta, 2005, Ombak.

Ligtvoet, A., “Geschiedenis van Gowa en Tallo”, dalam *TBG*, LXXII, 1932

Noorduyn, Jacob, “Islamisering van Makassar”, dalam *BKI*, 112, 1956.

Paulus, J., “Gorontalo” dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel*, ‘s-Gravenhage, 1917, Martinus Nijhoff

Pelras, Christiaan, *The Bugi*, Oxford, 1996, Blacwell Publ.

Riedel, G.J.F., “Het landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Katinggola of Andagile”, dalam *TBG*, XIX, 1870, halaman 46-176.

Schouten, M.J.C., *Leadership and Social Mobility in a Southeast Asian Society: Minahasa 1677-1983*, Leiden, 1998, KITLV Press